

CURRICULUM VITAE**PERSONAL DETAILS**

Name : Muhammad Adiguna Bimasakti
Office : Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
 (Administrative Court of Mataram)
Mailing Address : Jl. Dr. Soedjono, Jempong Baru, Sekarbella,
 Mataram.
E-mail/IG account: muhammad1adiguna@gmail.com / muhammad.adiguna@ui.ac.id
Gender : Male
Place/DOB : Jakarta / October 28th, 1994
Nationality : Indonesia
Google Scholar : <https://scholar.google.co.id/citations?hl=en&authuser=1&user=jE-5JPoAAAJ>
Youtube : 1) <https://www.youtube.com/@MuhammadAdigunaBimasakti>
 2) <https://www.youtube.com/channel/UC7CF7EffK7Xcmot3R8LQDZA>
 (POJOK HAN)

**EDUCATIONAL QUALIFICATION**

Period			School/ Institution / University
2012	-	2016	Faculty of Law Universitas Indonesia (Undergraduate)
2023	-	2025	Faculty of Law, Social and Political Sciences Universitas Mataram (Master Program)
2025	-	(On Going)	Faculty of Law, Social and Political Sciences Universitas Mataram (Doctoral Program)

LANGUAGE PROFICIENCY

Indonesia (Native Speaker)

English (Second Language – TOEFL PBT 2025 Score: 617)

EXPERIENCE AND NETWORKING

- Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum – Pilihan Penyelesaian Sengketa Fakultas Hukum UI / LKBH – PPS FHUI (Legal Aid Institution - Alternative Dispute Resolution, Faculty of Law of Universitas Indonesia)**
 Period : August 2015 – April 2016
 Position : Paralegal and Consultant
- PT ASI Pudjiastuti Aviation (SUSI AIR)**
 (Aircraft Operator / Airline Company)
 Period : April 2016 – August 2017
 Position : Legal Officer
- Mahkamah Agung Republik Indonesia (Supreme Court of the Republic of Indonesia)**
 Period : December 2017 – Now
 Current Position : Administrative Judge at the Administrative Court of Mataram / PTUN Mataram (June 2023 – Now)
 Editor at “Jurnal Hukum Peratun Mahkamah Agung RI” (2019 - Now)
<https://jurnalhukumperatun.mahkamahagung.go.id/index.php/peratun/about/editorialTeam>

*Other Social Media accounts see: https://linktr.ee/muhammad_adiguna

LIST OF PUBLICATIONS**I. BOOKS (AS AUTHOR)**

1. *Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad / OOD) dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
2. *Hukum Acara dan Wacana Citizen Lawsuit di Indonesia Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan: Sebuah Sumbangan Pemikiran*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
3. *Hukum Administrasi dan Peradilan Tata Usaha Negara di Era Peradilan Elektronik*. Bogor: CV. Kreatif Publishing, 2019.
4. *Aqidah dan Syariah Islam: Sebuah Bunga Rampai*. Bogor: Spasi Media, 2019.
5. *Panduan Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik (e-Litigasi)*. Jakarta: Kencana, 2020 (Revised Edition: 2022).
6. *Praktik dan Wacana Seputar Persidangan Elektronik (e-Litigation) di Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
7. *Negara dalam Keadaan Darurat (Kontekstualisasinya pada Penanganan Pandemi Corona Virus Disease / Covid-19)*. Bogor: Spasi Media, 2020.
8. *Sengketa-Sengketa Tata Usaha Negara Khusus (Dari Sengketa Informasi Publik sampai Sengketa Pelanggaran Administratif Pemilu)*. Bogor: Bukupedia Indonesia, 2020.
9. *Aspek-Aspek Hukum Pelayanan Publik Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021.
10. *Hukum Administrasi Negara Kontemporer (Konsep, Teori dan Penerapannya di Indonesia)*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2023.
11. *Tindakan-Tindakan Pemerintahan (Bestuurshandelingen) (Dari Keputusan, Tindakan Faktual, sampai Perjanjian oleh Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata)*. Yogyakarta: Pustaka Hukum, 2025.
12. *Carut Marut Hukum Administrasi Negara Indonesia (Catatan Kritis dan Evaluasi Atas Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja)*. Yogyakarta: Pustaka Hukum, 2025.
13. *Pengujian Formal dan Material Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang oleh Mahkamah Agung*. Yogyakarta: Pustaka Hukum, 2025.

14. *Buku Saku Hukum Pidana Indonesia (Termasuk Hukum Acara Pidana dan Pidana Militer)*. Jakarta: Solidaritas Hakim Indonesia, 2025.
15. *Hukum Pembuktian di Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Kencana, 2026.
16. *Aspek Hukum Perdata dan Administrasi Negara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: Kencana, 2026.

II. BOOKS (AS EDITOR)

1. *Kedudukan Debitor Utama dan Personal Guarantor dalam Permohonan Pernyataan Pailit*. Bogor: CV. EMedia Penerbit, 2019.
2. *Hukum Peradilan Elektronik pada Peradilan Tata Usaha Negara*. Bogor: Spasi Media, 2019.
3. *Konstruksi Hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Dalam Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
4. *Bunga Rampai Pemikiran Hukum Administrasi Negara Pasca Undang-Undang Cipta Kerja (Aspek Persetujuan Lingkungan, Perizinan, Diskresi dan Kewenangan PTUN)*. Bogor: Kreatif Publishing, 2022.
5. *Bunga Rampai Pemikiran Hukum Pidana dan Perdata Kontemporer*. Bogor: Kreatif Publishing, 2022.
6. *Bunga Rampai Solidaritas Hakim Indonesia 2025 (Penguatan Jabatan Hakim di Bawah Mahkamah Agung)*. Yogyakarta: Pustaka Hukum, 2025.

III. CHAPTER IN BOOK

1. *Permasalahan Delegasi Peraturan Perundang-Undangan untuk Pidana Adat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. In: Heru Susetyo, *et.al.* (Editor). *Percikan Pemikiran Makara Merah: Dari FH UI Untuk Indonesia, Edisi 2*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019. pp. 88-95.
2. *Konsep Domisili Elektronik Dalam Peradilan Elektronik Dan Penggunaannya Di Peradilan Tata Usaha Negara*. In: Muhammad Adiguna Bimasakti *et.al.*, *Hukum Acara Peradilan Elektronik pada Peradilan Tata Usaha Negara*. Bogor: Kreatif Publishing, 2019.
3. *Legalitas Sertipikat Tanah Elektronik (Digitalisasi Sektor Agraria di Era E-Government)*. In: Heru Susetyo, *et.al.* (Editor). *Percikan Pemikiran Makara Merah: Dari FH UI Untuk Indonesia, Edisi 4*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021. pp. 161-168.

4. *Wacana Pemberian Kewenangan Fiat Eksekusi Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Atas Hasil Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan di Luar Pengadilan*. In: Enrico Simanjuntak (Editor), *Beberapa Pemikiran Tentang Peradilan Administrasi dan Keadilan Administratif (Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.H)*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2022.
5. *Prospek Gugatan Citizen Lawsuit dalam Sengketa Tata Usaha Negara*. In: Yodi Martono Wahyunadi *et.al.*, *PTUN Untuk Keadaban Publik*. Bandung: Litera Bekerjasama dengan PTUN Bandung, 2022.
6. *Peraturan Kebijakan Sebagai Objek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. In: Fahmi Ramadhan Firdaus *et.al.*, *Dinamika Negara Hukum Pasca Perubahan UUD 1945 (Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN))*. Bandarlampung: Pusaka Media, 2022.
7. *Doktrin Hukum Administrasi Negara Terkait Unsur Menyalahgunakan Kewenangan Dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. In: Bagus Sujatmiko (Editor), *Bunga Rampai Kajian Dunia Peradilan*. Yogyakarta: Pustaka Hukum, 2025.
8. *Pola Rekrutmen Ideal Hakim Karir Di Bawah Mahkamah Agung Sebagai Pejabat Negara*. In: Muhammad Adiguna Bimasakti (Editor), *Bunga Rampai Solidaritas Hakim Indonesia 2025 (Penguatan Jabatan Hakim di Bawah Mahkamah Agung)*. Yogyakarta: Pustaka Hukum, 2025.
9. *Pengakuan Kecerdasan Buatan sebagai Subjek Hukum*. In: Gratianus Prikasetya Putra *et.al.* (Editor). *Refleksi atas Hukum, Kekuasaan dan Moralitas di Indonesia (Percikan Pemikiran Makara Merah FH UI Untuk Indonesia)*. Jakarta: UI Publishing, 2026. pp. 355-366.

IV. CONFERENCES, SHORT COURSES AND WORKSHOPS

1. “*Normativisation Discourse of Fatwa of Indonesia’ Ulama Council (MUI) No. 56 Year 2016 regarding the Using of Non-Muslim Religious Attributes.*” Delivered in “4th International Annual Conference on Fatwa Studies”, held by *Majelis Ulama Indonesia*, Depok, July 2019. https://www.researchgate.net/publication/337058468_NORMATIVISATION_DISCOURSE_OF_FATWA_OF_INDONESIA'S_ULAMA_COUNCIL_MUI_NO_56_YEAR_2016_REGARDING_THE_USING_OF_NON-MUSLIM_RELIGIOUS_ATTRIBUTES
2. *Legalitas Sertipikat Tanah Elektronik dan Permasalahannya (Tantangan SektorPertanahan di Era E-Government)*. Delivered in Webinar: “*Pembaruan Hukum Administrasi di Era Birokrasi Digital*”, held by Faculty of Law of Universitas Islam

Indonesia, Yogyakarta, 28 September 2021.
<https://drive.google.com/file/d/1RLriNwL-WgtLaXxmacO5FDMfdFcT3N0g/view>

3. *Peraturan Kebijakan Sebagai Objek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. Delivered in “Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara I 2022”, held by Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), Bali, 19-21 June 2022.
4. *Pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap Kebijakan dan Praktik Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. Delivered in “8th International Annual Conference on Fatwa Studies”, held by Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jakarta, 26-28 July 2024. <http://fatwamui.com/storage/645/IACFS-2024-book.pdf>.
<https://mui.or.id/baca/berita/sebanyak-60-peserta-acfs-mui-resmi-terpilih-berikut-daftar-lengkapny>
5. *Permasalahan Instrumen Delegasi Kewenangan Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*. Delivered in “Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara III 2024”, held by Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), Balikpapan, 6-9 December 2024.
<https://proceedingaphtnhan.id/index.php/paphtnhan/article/view/78>
6. *Pencegahan Penyebaran Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama Islam Berdasarkan Fatwa MUI No. 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 Sebagai Kewajiban Negara*. Delivered in “9th International Annual Conference on Fatwa Studies”, held by Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jakarta, 26-28 July 2025.
<https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/hakim-ptun-mataram-wakili-mahkamah-agung-dalam-acfs-ke-9-0rq>
7. *Pengakuan Kecerdasan Buatan sebagai Subjek Hukum Administrasi Negara*. Delivered in “Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Ilmu Perundang-undangan”, held by Asosiasi Pengajar Ilmu Perundang-undangan (ASIPPER), Jakarta, 23-24 October 2025. <https://asipper.or.id/index.php/KNASIPPER2025/article/view/52>.
8. The 1st Judicial Wellbeing Workshop for ASEAN Judges. Bali 30 March – 1 April 2026.
<https://suarabsdk.com/ketua-mahkamah-agung-ri-buka-acara-the-first-judicial-well-being-workshop-for-asean-judges-di-bali/>
9. Short Course for Indonesian Judges. 26-29 April 2026, held by National Judicial Academy, Bhopal, Madhya Pradesh, India.
<https://suarabsdk.com/catatan-street-food-hari-pertama-short-course-hakim-di-india/>

V. ARTICLES IN JOURNALS AND MAGAZINES

1. "Onrechtmatig Overheidsdaad (OOD) / Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Oleh Penguasa (Negara) dari Sudut Pandang UU Administrasi Pemerintahan." *Majalah Varia Peradilan* No. 391, 2018, pp. 72-85.
2. "Onrechtmatig Overheidsdaad oleh Pemerintah dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum Peratun* Vol. 1 No. 2, 2018, pp. 265-286.
https://www.researchgate.net/publication/329530113_PERBUATAN_MELAWAN_HUKUM_OLEH_PEMERINTAH_ONRECHTMATIG_OVERHEIDSDAAD_DARI_SUDUT_PANDANG_UNDANG-UNDANG_ADMINISTRASI_PEMERINTAHAN
3. "Meninjau Zakat Penghasilan pada Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 dan Ijtihad Yusuf Qaradhawy." *Jurnal Hukum Islam UIN Sultan Syarif Kasim*, Vol. 18 No. 2, 2019, pp. 1-19.
<https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/download/6172/3894>
4. "Doa Bersama dalam Pandangan Islam." *Jurnal Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah*. Vol. 5 No. 2, 2019, pp. 168-184.
<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aqidah-ta/article/view/10651/pdf>
5. "Keabsahan Perkawinan Beda Agama dan Kewenangan Mengadili Sengketanya dalam Perspektif Hukum Antar Tata Hukum Indonesia." *Journal of Islamic Law Studies, Sharia Journal*. Vol 4 No. 9, 2019, pp. 36-61.
<https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1071&context=jils>
6. "Meninjau Kedudukan Pelaku Riddah dan Hukuman Mati Bagi Pelaku Riddah Berdasarkan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Sudut Pandang Islam." *Journal of Islamic Law Studies, Sharia Journal*. Vol 4 No. 9, 2019, pp. 62-84.
<https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1072&context=jils>
7. "Meninjau Kekuatan Pembuktian Pengakuan Pihak dalam Sistem Pembuktian pada Peradilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum Peratun* Vol. 2, No. 1, 2019, pp. 90 – 107.
https://www.researchgate.net/publication/345578634_Meninjau_Kekuatan_Pembuktian_Pengakuan_Pihak_Dalam_Sistem_Pembuktian_Pada_Peradilan_Tata_Usaha_Negara
8. "Impeachment of Student Representative Element in the Universitas Indonesia' Board of Trustees According to Administrative Law Viewpoint." *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 3 No. 1, 2020, pp. 51-70.
https://www.researchgate.net/publication/349858405_IMPEACHMENT_OF_STUDENT_REPRESENTATIVE_ELEMENT_IN_THE_UNIVERSITAS_INDONESIA'_BOARD_OF_TRUSTEES_ACCORDING_TO_ADMINISTRATIVE_LAW_VIEWPOINT

9. "Merekonstruksi Paradigma Gugatan Citizen Lawsuit di Indonesia Sebagai Sengketa Administrasi." *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 50 No. 1, 2019, pp. 230-244. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1149&context=jhp>
10. "Lawsuit in Administrative Court after Administrative Proceedings Based on PERMA No. 6 of 2018." *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 8 No. 3, 2019, pp. 458-480. <https://www.jurnalhukumdanperadilan.org/jurnalhukumperadilan/article/view/258/219>
11. "Dispute Settlement in the Ombudsman and the Court of Law Regarding Compensation in Public Service Dispute." *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 10 No. 2, 2021, pp. 277-299. <https://www.jurnalhukumdanperadilan.org/jurnalhukumperadilan/article/view/372/276>
12. "Pembaruan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Reformasi Di Era Peradilan Elektronik." *Jurnal Hukum Peratun* Vol. 3 No. 2 September 2020. pp. 111-126. [researchgate.net/publication/350350979_RENEWING_THE_LAW_OF_ADMINISTRATIVE_COURT_POST-REFORMATION_IN_THE_ERA_OF_ELECTRONIC_LITIGATION?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1Ym9uY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InByb2ZpbGUifX0](https://www.researchgate.net/publication/350350979_RENEWING_THE_LAW_OF_ADMINISTRATIVE_COURT_POST-REFORMATION_IN_THE_ERA_OF_ELECTRONIC_LITIGATION?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1Ym9uY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InByb2ZpbGUifX0)
13. "Beberapa Kesalahan Konseptual Pada UU Cipta Kerja Menurut Ilmu Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Hukum Peratun* Vol. 4 No. 2 February 2021. pp. 111-126. https://www.researchgate.net/publication/359496158_SEVERAL_CONCEPTUAL_ERRORS_IN_THE_JOB_CREATION_LAW_IN_THE_LIGHT_OF_THE_SCIENCE_OF_ADMINISTRATIVE_LAW
14. "Permasalahan Aspek Formil Penyelesaian Sengketa Pembatalan Penetapan Calon Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota/Provinsi Terpilih." *Jurnal Hukum Peratun* Vol. 4 No. 2 September 2021. pp. 111-126. https://www.researchgate.net/publication/359990704_SEVERAL_PROBLEMS_IN_FORMAL_ASPECTS_FOR_DISPUTE_SETTLEMENT_REGARDING_CANCELLATION_OF_ELECTED_CANDIDATES_OF_MEMBERS_OF_THE_HOUSE_OF REPRESENTATIVE_AND_THE_REGENCYCITYPROVINCIAL_HOUSE_OF REPRESENTATIVE
15. "Penjelasan Hukum (Restatement) Konsep Tindakan Administrasi Pemerintahan Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 11 No. 1, 2022, pp. 64-92. <https://www.jurnalhukumdanperadilan.org/jurnalhukumperadilan/article/download/532/294/2251>
16. "Wacana Optimalisasi Peradilan Elektronik dalam Proses Eksekusi Putusan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum Peratun* Vol. 5 No.1 February 2022. pp. 19-38.

https://www.researchgate.net/publication/363928553_DISCOURSE_OF_ELECTRONIC_JUDICIARY_REGARDING_EXECUTION_OF_COURT_DECISIONS_IN_THE_ADMINISTRATIVE_JUDICIARY_BODY

17. "Wacana Pemberian Kewenangan Fiat Eksekusi Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara atas Hasil Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan di Luar Pengadilan." *Jurnal Hukum Peratun* Vol. 5 No.2 September 2022. pp. 175-206. https://www.researchgate.net/publication/363927656_DISCOURSE_ON_GRANTING_FIAT_EXECUTION_AUTHORITY_TO_THE_ADMINISTRATIVE_COURT_ON_THE_RESULTS_OF_THE
18. "Problematik Konstitusionalitas Naturalisasi di Indonesia." *Pancasila Jurnal Keindonesiaan*, Vol. 3 No. 1, 2023. pp. 100-112. <https://ejournalpancasila.bpip.go.id/index.php/PJK/article/download/149/63>
19. "Legal Protection against Legal Uncertainty of Tacit Approval under Indonesian Job Creation Law." *South-East Asian Journal of Advanced Law and Governance* Vol. 1 No. 1 (2024), pp. 38-52. <https://journal.ugm.ac.id/v3/SEAJALGOV/article/view/9922/4132>
20. "Review Aspects and Tools for Formal Review of Legislation under the Law by the Supreme Court." *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan* Vol. 9 No. 2 (2025), pp. 237-248. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum/article/download/10052/4703>
21. "Kerangka Hukum Pengakuan Agama dan Kepercayaan dalam Kerangka Kebebasan Beragama di Indonesia." *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* Vol. 5 No. 1 (2025), pp. 113-124. <https://ejournalpancasila.bpip.go.id/index.php/PJK/article/download/669/111>

VI. RESEARCH

1. *Pembaruan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2021. Coordinator: Sudarsono, S.H., M.H. <https://ebook.bsdk.mahkamahagung.go.id/index.php/product/121-kajian-pembaruan-hukum-acara-di-peradilan-tata-usaha-negara/>
2. *Pendampingan Penguatan Literasi, Pendaftaran dan Manajemen Perkara pada PTUN di Propinsi Papua pada Masa Pandemi COVID-19*. Bidang Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021. Coordinator: Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo, S.H., M.Si. <https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6027525/?view=services#!>
3. *Naskah Urgensi Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Kabupaten/Kota Pada Setiap Provinsi di Indonesia*. Pustrajak Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2024. Coordinator: Dr. M. Ikbar Andi Endang, S.H., M.H.

*Other Social Media accounts see: https://linktr.ee/muhammad_adiguna

<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/pembentukan-pengadilan-tata-usaha-negara-di-kabupaten-kota-pada-setiap-provinsi-di-indonesia/detail>

4. *Naskah Akademik Perubahan Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Pustrajak Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2026. Coordinator: Dr. Umar Dani, S.H., M.H.
<https://suarabsdk.com/akademisi-universitas-gadjah-mada-urgensi-refleksi-pembaruan-ruu-peradilan-tata-usaha-negara/>

VII. PRESENTATIONS

1. *Perjanjian Institutional Pemerintahan di Indonesia dalam Sudut Pandang Hukum Administrasi Pemerintahan*. Delivered in Focus Group Discussion (FGD) “Pembekalan Biro Hukum Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional”. Bogor, 19-20 April 2021. <https://jdih.bappenas.go.id/berita/detailberita/2528>
2. *Sengketa Informasi Publik dan Penyelesaiannya*. Delivered in “Workshop Peningkatan Pelayanan Informasi Publik dan Penanganan Sengketa Informasi di Ditjen Bina Marga Tahun 2021, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.” Jakarta, 14 October 2021. <https://ptun-jayapura.go.id/permintaan-menjadi-narasumber-focus-group-discussion-fgd-bagi-hakim-bapak-muhammad-adiguna-bimasakti-s-h/>
3. *Permasalahan Proses Beracara di Peradilan TUN dalam Sengketa Pertanahan Untuk Kementerian ATR/BPN dan Jajarannya*. Delivered in: “Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Perkara Pertanahan Semester I Tahun 2023, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional”. Lombok, 20 July 2023. https://www.youtube.com/watch?v=2_e_fqxeI4U&t=423s
4. *Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Proses Pemilihan Umum 2024*. Delivered in: “Rapat Evaluasi Penyelesaian Sengketa Proses dalam Pemilu 2024” held by BAWASLU Provinsi NTB. Mataram, 10 June 2024. <https://www.instagram.com/p/C8EziLqSpBd/>
5. *Urgensi dan Materi Muatan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Keputusan Fiktif Positif Pasca UU Cipta Kerja*. Delivered in “Workshop Pembentukan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Penerimaan Permohonan guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan, held by Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia.” Jakarta, 19 July 2024.
6. *Doktrin Hukum Administrasi Negara Terkait Unsur Menyalahgunakan Kewenangan Dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Delivered in: “Focus Group Discussion (FGD) ke-33” held by Forum Kajian Dunia Peradilan, 14 December 2024.

*Other Social Media accounts see: https://linktr.ee/muhammad_adiguna

<https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-benturan-unsur-menyalahgunakan-ke%20wenangan-dalam-uu-tipikor-dan-uu-administrasi-pemerintahan-lt676951fd199ea/>

7. *Prospek Penerapan Citizen Lawsuit dalam Sengketa Tata Usaha Negara (Memaknai Ulang Asas Hukum "Point d'intérêt, Point d'action")*. Delivered in "Diskusi Reboan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung." Bandung, 15 September 2021. <http://ptun-bandung.go.id/index.php?id=735>
8. *Mitos Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Delivered in "Kuliah Umum Program Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Malang", 04 Desember 2025.
9. *Hukum Antar Tata Hukum di Peradilan Agama*, Delivered in "Diskusi Ke-1 Hakim Peradilan Agama Angkatan 8 OKTASA", 8 January 2026. https://www.instagram.com/p/DStRJFok_kE/
10. *Kompetensi Absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Niaga Dalam Sengketa Perlindungan Konsumen OJK Vs PUJK*, Delivered in "Diskusi Ke-2 Hakim Peradilan Agama Angkatan 8 OKTASA", 29 January 2026. <https://www.instagram.com/p/DTZfKIqE4ZF/>
11. *Perkawinan Umat Agama Baha'i Dan Kaitannya Dengan Pidana Zina & Kohabitasi Di Indonesia*. Delivered in "Konsorsium Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kudus: Kohabitasi dan Hak Sipil Umat Agama Baha'i", 3 March 2026. <https://hki.uinsuku.ac.id/berita-63820-fakultas-syariah-uin-sunan-kudus-bedah-hak-sipil-baha%E2%80%99i-menakar-peran-peradilan-tun-dalam-menjamin-k.html>
12. *Dinamika Penegakan Hukum 28 Tahun Reformasi Indonesia*. Delivered in "Refleksi Reformasi: Peran Pemegang Estafet dan Dinamika Penegakan Hukum" at Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kudus, 4 June 2026.

VIII. ONLINE ARTICLE

1. *Batasan Tindakan dalam Hukum Administrasi Pemerintahan dan Perbuatan dalam Hukum Perdata oleh Pemerintah.* Source: <https://ptun-makassar.go.id/batasan-tindakan-dalam-hukum-administrasi-pemerintahan-dan-perbuatan-dalam-hukum-perdata-oleh-pemerintah/>. Published: October 2018.
2. "BERKENALAN DENGAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA." Source: <https://ptun-mataram.go.id/berita/artikel/547-berkenalan-dengan-hukum-administrasi-negara.html>. Published: 16 August 2023.
3. "SUMBER-SUMBER HUKUM ADMINISTRASI NEGARA." Source: <https://ptun-mataram.go.id/berita/artikel/549-sumber-sumber-hukum-administrasi-neGara.html>. Published: 03 October 2023.

*Other Social Media accounts see: https://linktr.ee/muhammad_adiguna

4. “CATATAN EVALUASI UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (UU AP).” Source: <https://www.ptun-mataram.go.id/berita/artikel/551-catatan-evaluasi-undang-undang-no-30-tahun-2014-tentang-administrasi-pemerintahan-uu-ap-2.html>. Published: 18 October 2023.
5. “MAZHAB HUKUM YANG TEPAT DITERAPKAN DALAM KONDISI HUKUM INDONESIA SAAT INI.” Source: <https://www.ptun-mataram.go.id/berita/artikel/553-mazhab-hukum-yang-tepat-diterapkan-dalam-kondisi-hukum-indonesia-saat-ini.html>. Published: 11 January 2024.
6. “ISU-ISU HUKUM ACARA UNTUK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA.” Source: <https://www.ptun-mataram.go.id/berita/artikel/554-isu-isu-hukum-acara-untuk-perubahan-undang-undang-tentang-peradilan-tata-usaha-negara.html>. Published: 5 February 2024.
7. “KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH OTONOM MELAKUKAN PERJANJIAN KEPERDATAAN DAN BATASANNYA DALAM KERANGKA HUBUNGAN WEWENANG PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH.” Source: <https://www.ptun-mataram.go.id/berita/artikel/581-kewenangan-pemerintah-daerah-otonom-melakukan-perjanjian-keperdataan-dan-batasannya-dalam-kerangka-hubungan-wewenang-pemerintah-pusat-dan-daerah.html>. Published: 3 September 2024.
8. “Beberapa Permasalahan Terkait Perizinan Berusaha dalam Kerangka Kemudahan Berusaha.” Source: <https://www.ptun-mataram.go.id/berita/artikel/747-beberapa-permasalahan-terkait-perizinan-berusaha-dalam-kerangka-kemudahan-berusaha.html>. Published: 16 July 2025.
9. “ALTERNATIF PERAMPASAN ASET AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI SEBELUM ADANYA UU PERAMPASAN ASET MELALUI GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.” Source: <https://www.ptun-mataram.go.id/berita/artikel/776-alternatif-perampasan-aset-akibat-tindak-pidana-korupsi-sebelum-adanya-uu-perampasan-aset-melalui-gugatan-perbuatan-melawan-hukum.html>. Published: 01 September 2025.
10. “PERAN FILSAFAT HUKUM DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL.” Source: <https://www.ptun-mataram.go.id/berita/artikel/793-peran-filsafat-hukum-dalam-pembangunan-hukum-nasional.html>. Published: 20 December 2025.

Mataram, August 17th, 2026

(Signed)

Muhammad Adiguna Bimasakti

*Other Social Media accounts see: https://linktr.ee/muhammad_adiguna